Dampak Kebijakan Publik terhadap Ketimpangan Sosial di Era Digital

Sundari
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
E-mail: sundari.kawaru@gmail.com

Article History:
Received: 26 Agustus 2024
Revised: 08 September 2024
Accepted: 10 September 2024

Keywords: *Kebijakan Publik, Ketimpangan Sosial, Era Digital*

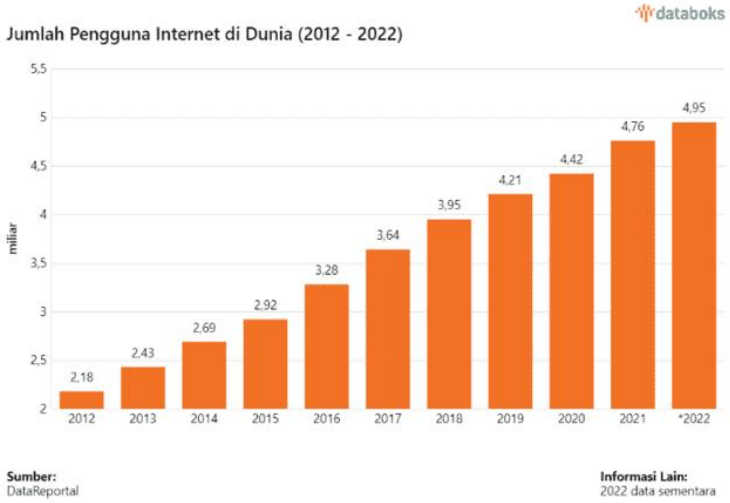
Abstract: *Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan sosial di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh kebijakan publik terhadap ketidaksetaraan sosial di era digital, dengan penekanan pada akses terhadap teknologi, pendidikan digital, dan pengaruhnya terhadap lapangan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dan analisis bibliometrik untuk mengidentifikasi tren dan pola yang ada dalam literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang bersifat inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial, sedangkan kebijakan yang eksklusif justru memperburuk keadaan tersebut. Kesimpulan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang memperhatikan akses dan pendidikan digital untuk membangun masyarakat yang lebih adil di era digital.*

PENDAHULUAN

Dalam era digital, ketidaksetaraan sosial menjadi masalah yang semakin mendesak untuk menjadi perhatian. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, akses terhadap informasi dan sumber daya semakin gampang, namun tidak semua individu atau kelompok dapat merasakan manfaatnya. Menurut laporan dari Bank Dunia (2020) dalam (Nakayama et al. 2023), sekitar 3,7 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses internet, dan mayoritas dari mereka berasal dari daerah yang kurang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang ada saat ini belum cukup efektif dalam menjembatani kesenjangan yang ada.

Grafik ini menggambarkan tren peningkatan jumlah pengguna internet di seluruh dunia dari tahun 2012 hingga 2022 berdasarkan data dari DataReportal. Pada tahun 2012, jumlah pengguna internet global tercatat sebesar 2,18 miliar orang, dan angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah pengguna mencapai 3,28 miliar dan terus bertambah secara signifikan hingga mencapai 4,21 miliar pada tahun 2019. Pertumbuhan yang lebih cepat terlihat antara tahun 2019 hingga 2021, di mana jumlah pengguna meningkat dari 4,21 miliar menjadi 4,76 miliar, kemungkinan dipicu oleh adopsi teknologi digital yang semakin luas dan meningkatnya penggunaan layanan online selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet global diperkirakan mencapai 4,95 miliar, meskipun data ini masih

bersifat sementara. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dalam penggunaan internet selama satu dekade terakhir, mencerminkan semakin tingginya aksesibilitas dan ketergantungan masyarakat global terhadap teknologi digital.



Gambar 1: pengguna Internet 2012-2022

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan antara kebijakan publik dan ketimpangan sosial. Misalnya, penelitian oleh (Piachaud 2014) menyoroti bagaimana kebijakan perpajakan yang tidak adil dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Selain itu, Penelitian lain juga menyoroti pentingnya pengenalan pajak yang lebih progresif terhadap kekayaan, pendapatan, dan warisan untuk mengurangi ketimpangan, seperti yang dibahas dalam perbandingan (Piachaud 2014) antara tahun 2014 dan 2020 Kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. studi oleh (Prajaknate 2017) menyatakan bahwa akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, yang berujung pada ketimpangan dalam pendidikan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat dirumuskan untuk mengatasi masalah ini

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial juga terlihat jelas. Data dari Badan Pusat Statistik (Statistik 2021) menunjukkan bahwa indeks gini di Indonesia mencapai 0,384, yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Kebijakan publik yang tidak merata dalam penyebaran teknologi dan pendidikan digital semakin memperburuk kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial di era digital.

Periode	Nasional	Perkotaan	Perdesaan
Maret 2021	0,384	0,401	0,315
September 2021	0,381	0,398	0,314
Maret 2022	0,384	0,403	0,314

Gambar 2.Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2022

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 18,06 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2022

berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,07 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,01 persen, yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana kebijakan pendidikan digital dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akses individu terhadap peluang kerja yang lebih baik. Tanpa adanya kebijakan yang mendukung pendidikan digital, banyak individu akan tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kebijakan publik yang ada sangat diperlukan(Troyan et al. 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji berbagai kebijakan publik yang telah diterapkan di berbagai negara dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial di era digital.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks era digital, ketimpangan ini sering kali berkaitan dengan akses terhadap teknologi dan pendidikan digital. Menurut teori akses digital yang dikemukakan oleh Van Dijk (2005) dalam (Troyan et al. 2023), ada beberapa dimensi akses yang perlu diperhatikan, yaitu akses fisik, akses material, dan akses sosial. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi digital.

Kebijakan publik sangat penting dalam menentukan akses individu terhadap pendidikan dan teknologi. Kebijakan yang inklusif, seperti menyediakan infrastruktur internet di daerah terpencil, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya. Sebaliknya, kebijakan yang eksklusif, seperti membatasi akses internet atau tidak memberikan dukungan untuk pendidikan digital, dapat memperburuk ketimpangan social. Menurut penelitian yang dilakukan (Tate and Warschauer 2022) mendapatkan pendidikan digital yang memadai dapat membantu orang untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja yang semakin digital.

kebijakan publik yang menargetkan ketimpangan digital untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan multidisiplin guna mengatasi ketimpangan digital (Imran 2023) kebijakan untuk mengatasi ketimpangan digital perlu melibatkan struktur, aktor, dan teknologi yang lebih inklusif. Dengan kebijakan publik yang tepat, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan digital yang semakin melebar melalui teknologi digital yang inovatif (Miroshnichenko, Morozova, and Meshcheryakova 2021).

Selain itu, teori kapital sosial juga memiliki relevansi dalam konteks ini. Menurut Bourdieu (1986) dalam (Merisalo and Makkonen 2022), individu yang memiliki akses ke jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan publik yang mendorong kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dapat membantu membangun jaringan sosial yang lebih kokoh, sehingga mengurangi ketimpangan sosial di era digital. Ketidaksetaraan digital memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di zaman digital. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu difokuskan pada

penanganan risiko ketidaksetaraan sosial melalui transformasi digital (Gorlov Konstantin N. 2021). Ketidaksetaraan digital menjadi hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung inklusi digital sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan peluang sosial-ekonomi (Perera et al. 2023)

Dengan memahami teori-teori ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan publik dapat dirumuskan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi digital. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks lokal dan global dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

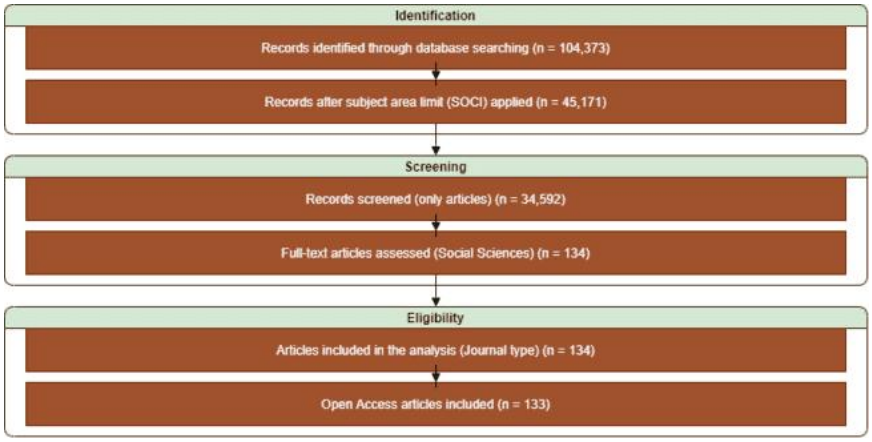
METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR) (Dwi Hernanik, Sudarmiatin, and Sumarsono 2023) untuk mengumpulkan serta menganalisis literatur yang relevan mengenai dampak kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial di era digital. SLR adalah metode yang terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis penelitian yang sudah ada. Selain itu, analisis bibliometrik juga diterapkan untuk memahami tren dan pola dalam literatur, serta untuk menemukan penulis dan publikasi yang berpengaruh dalam bidang ini.

Proses SLR dimulai dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk literatur yang akan dianalisis. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas kebijakan publik dan ketimpangan sosial di era digital, sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan atau tidak melalui proses peer-review. Setelah itu, pencarian dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar dan Scopus dengan menggunakan kata kunci yang relevan.

Setelah mengumpulkan literatur yang tepat, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam penelitian. Data yang diperoleh dari analisis bibliometrik juga dimanfaatkan untuk memetakan jaringan kolaborasi antar peneliti dan institusi yang berkontribusi dalam bidang ini. Hasil dari analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk mengatasi ketimpangan sosial di era digital.

Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik dan ketimpangan sosial, serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk pembuat kebijakan. Adapun alur pengumpulan literatur dapat diidentifikasi melalui PRISMA Flow.

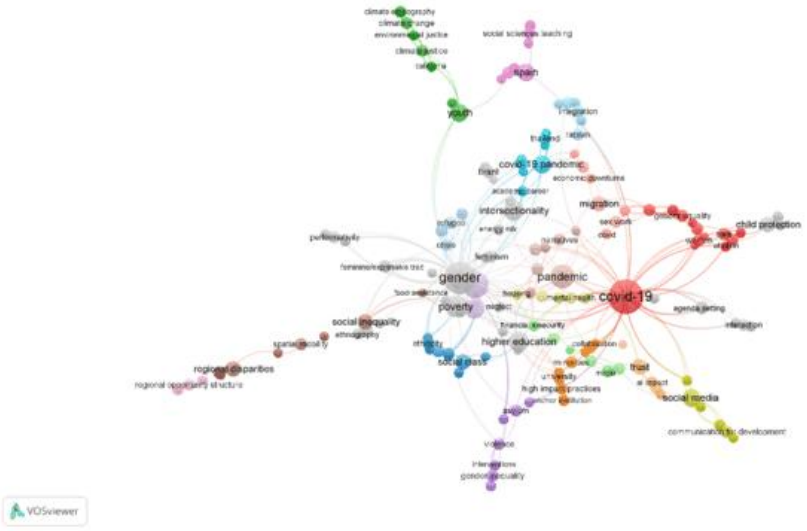


Gambar 3. Tabel Prisma Flow (Scopus)

Pada gambar di atas, metode tinjauan sistematis ditampilkan melalui diagram alur PRISMA untuk menggambarkan proses seleksi literatur. Awalnya, pencarian basis data

menghasilkan 104.373 rekaman, yang kemudian dibatasi pada subjek Ilmu Sosial (SOCI) menjadi 45.171 rekaman. Setelah penyaringan lebih lanjut untuk fokus pada artikel ilmiah, tersaring 34.592 artikel, dan dari jumlah tersebut, 134 artikel dipilih untuk penilaian teks penuh. Semua artikel yang dinilai layak untuk dianalisis, dengan sebagian besar berupa artikel akses terbuka, memastikan ketersediaan data untuk penelitian. Proses ini memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber yang spesifik, relevan, dan kredibel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dampak kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial di era digital, serta menawarkan wawasan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 4. visualisasi jaringan bibliometrik

Visualisasi jaringan bibliometrik yang dihasilkan menggunakan VOSviewer. Visualisasi Ini menunjukkan hubungan antar topik yang relevan dalam penelitian mengenai "Dampak Kebijakan Publik terhadap Ketimpangan Sosial di Era Digital." Berikut adalah analisis hasil dan penjelasan dari gambar tersebut:

1. Topik Utama (Covid-19): Topik "Covid-19" muncul sebagai pusat dari jaringan, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berperan penting dalam diskusi mengenai ketimpangan sosial. Pandemi ini memperburuk ketimpangan yang sudah ada, khususnya dalam konteks kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan anak, dan layanan sosial.
2. Keterkaitan dengan Ketimpangan Sosial: Node seperti "ketimpangan sosial," "kemiskinan," "gender," dan "migrasi" sangat terhubung dengan topik utama. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di era digital sering kali harus menghadapi isu-isu ketimpangan sosial yang saling terkait, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan masalah migrasi yang meningkat selama pandemi.
3. Dampak pada Kelompok Rentan: Node "perlindungan anak," "kesetaraan gender," dan "kesehatan mental" menunjukkan bahwa kebijakan publik harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang terdampak, seperti perempuan, anak-anak, dan individu yang mengalami tekanan mental. Ini menekankan pentingnya kebijakan yang

inklusif dan berfokus pada kesejahteraan sosial.

4. Peran Media Sosial dan Kepercayaan (Trust): Node "media sosial" dan "kepercayaan" menunjukkan peran penting media digital dalam membentuk opini publik dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Di era digital, informasi yang tersebar melalui media sosial dapat mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik.
5. Isu Pendidikan Tinggi (Higher Education): Node "pendidikan tinggi" menunjukkan bahwa ketimpangan sosial juga meluas ke sektor pendidikan, dengan isu-isu seperti akses yang tidak merata, dampak ekonomi terhadap mahasiswa, dan tantangan bagi institusi pendidikan dalam merespons perubahan akibat digitalisasi dan pandemi.
6. Perubahan Iklim dan Keadilan Sosial: Keterkaitan dengan topik seperti "keadilan iklim" dan "keadilan lingkungan" mengindikasikan bahwa isu-isu lingkungan juga berhubungan dengan ketimpangan sosial, terutama dalam konteks kebijakan publik yang berkelanjutan.Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial di era digital sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek sosial yang saling terhubung.

Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan keterkaitan antar berbagai isu ini dan berupaya untuk mengurangi ketimpangan melalui pendekatan yang holistik dan inklusif (Imran 2023).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan publik dan ketidaksetaraan sosial di era digital. Kebijakan yang inklusif, seperti penyediaan akses internet di daerah terpencil dan dukungan untuk pendidikan digital, terbukti mampu mengurangi ketidaksetaraan sosial. Sebagai contoh, program "Internet Masuk Desa" yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan akses internet di wilayah terpencil (Iwana et al. 2022), yang selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan lapangan kerja (Kementrian sosial 2021)

Namun, kebijakan yang bersifat eksklusif juga dapat memperburuk ketimpangan sosial. Sebagai contoh, kebijakan yang membatasi akses internet di beberapa wilayah atau kekurangan dukungan untuk pendidikan digital dapat menyebabkan individu atau kelompok tertentu tertinggal. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI 2022) mengungkapkan bahwa hanya 40% masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses internet, sedangkan di kota-kota besar, angkanya mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak merata dapat memperparah kesenjangan yang ada.

Dampak dari kebijakan publik terhadap lapangan kerja juga menjadi perhatian dalam studi ini. Dengan adanya pendidikan digital yang memadai, individu akan lebih siap untuk memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif. (World Economic Forum 2022) menunjukkan bahwa 94% pekerja di seluruh dunia memerlukan keterampilan baru untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja akibat teknologi digital. Oleh karena itu, kebijakan publik yang mendukung pendidikan dan pelatihan digital sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam menangani kesenjangan sosial. Program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelatihan keterampilan digital yang diadakan oleh perusahaan teknologi, dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, program "Digital Talent Scholarship" yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan swasta telah berhasil

melatih ribuan individu dalam keterampilan digital yang dibutuhkan di pasar kerja (Kebudayaan 2021).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang inklusif dan kolaboratif dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial di era digital. Namun, perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap kebijakan yang eksklusif yang bisa memperburuk kondisi tersebut.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan bahwa kebijakan publik memiliki pengaruh yang besar terhadap ketimpangan sosial di era digital. Kebijakan yang inklusif dan mendukung akses terhadap teknologi serta pendidikan digital dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial, sedangkan kebijakan yang eksklusif malah memperburuk keadaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam menangani ketimpangan sosial, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam keberhasilan penelitian ini yang berjudul "Dampak Kebijakan Publik terhadap Ketimpangan Sosial di Era Digital, dan yang paling penting saya mengucapkan terimakasih kepada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

DAFTAR REFERENSI

APJI. 2022. "Akses Internet."

Dwi Hernanik, Nova, Sudarmiatin Sudarmiatin, and Hadi Sumarsono. 2023. "Internationalization of SMEs: SLR (Systematic Literature Review)." *International Journal of Science, Technology & Management* 4(4):893–901. doi: 10.46729/ijstm.v4i4.826.

Gorlov Konstantin N. 2021. "The Article Describes the Formation of Digital Economy from the Point of View of Emergence of Socio-Political Risks, in Particular the Risk of Social Inequality as a Result of Growth of Digital Inequality. The Study Was Conducted as a Part of Political Sc." *Sociopolitical Sciences* 13–18. doi: DOI: 10.33693/2223-0092-2021-11-1-13-18.

Imran, Ahmed. 2023. "Why Addressing Digital Inequality Should Be a Priority." *THE ELECTRONIC JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES* 89(3):e12255. doi: https://doi.org/10.1002/isd2.12255.

Iwana, Meriko Dian Candra, A. R. Rohma. Taufiq Hidayat, Dian Dinanti, and Kenichiro Onitsuka. 2022. "The Effects of Internet on Rural-to-Urban Migrating Intentions of Young Villagers: Evidence from Rural Indonesia." *Agraris* 8(2):139–59. doi: 10.18196/agraris.v8i2.14045.

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. 2021. "Penggunaan Teknologi Tepat Sasaran Jadi Kunci Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan."

Kementrian sosial. 2021. "Internet Masuk Desa."

Merisalo, Maria, and Teemu Makkonen. 2022. "Bourdieusian E-Capital Perspective Enhancing Digital Capital Discussion in the Realm of Third Level Digital Divide." *Information Technology and People* 35(8):231–52. doi: 10.1108/ITP-08-2021-0594.

Miroshnichenko, Inna, Elena Morozova, and Elena Meshcheryakova. 2021. "Policy for

Overcoming Digital Inequality: Structure, Actors and Technologies." *Proceedings of the 6th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2020)* 165(Emle 2020):401–5. doi: 10.2991/aebmr.k.210210.065.

Nakayama, Luis Filipe, William Warr Binotti, Naira Link Woite, Chrystinne Oliveira Fernandes, Pia Gabrielle Alfonso, Leo Anthony Celi, and Caio Vinicius Regatieri. 2023. "The Digital Divide in Brazil and Barriers to Telehealth and Equal Digital Health Care: Analysis of Internet Access Using Publicly Available Data." *Journal of Medical Internet Research* 25:1–10. doi: 10.2196/42483.

Perera, Prabath, Selva Selvanathan, Jayatilleke Bandaralage, and Jen-Je Su. 2023. "The Impact of Digital Inequality in Achieving Sustainable Development: A Systematic Literature Review." *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal* 42(6):805–25. doi: 10.1108/EDI-08-2022-0224.

Piachaud, David. 2014. "Piketty's Capital and Social Policy." *The British Journal of Sociology* 65(4):696–707. doi: https://doi.org/10.1111/1468-4446.12109.

Prajaknate, Pornpun. 2017. "Information Communication Technologies (ICT) for Education Projects in ASEAN: Can We Close the Digital Divide? BT - Sustainable Development Goals in the Asian Context." Pp. 107–33 in, edited by J. Servaes. Singapore: Springer Singapore.

Statistik, Badan Pusat. 2021. "Gini Ratio." *Maret*.

Tate, Tamara, and Mark Warschauer. 2022. "Equity in Online Learning." *Educational Psychologist* 57(3):192–206. doi: 10.1080/00461520.2022.2062597.

Troyan, Irina A., Larisa A. Kravchenko, Elena G. Gindes, И. А. Троян, Л. А. Кравченко, and Е. Г. Гиндес. 2023. "Digital Inequality and Directions for Overcoming It in the Context of Human Capital Development. Population." 26(2):114–26. doi: 10.1787/236405667766.

World Economic Forum. 2022. "The Future of Jobs Report 2020 | World Economic Forum." *The Future of Jobs Report* (October):1163.